

# **RINGKASAN RKPD**

**KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2005-2025 yang saat ini terjabarkan dalam rancangan RPJMD 2021-2026. Periode Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan dan berfokus pada Visi Misi dari Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah di tahun 2021 yang lalu. Hal ini penting agar konsistensi antara dokumen perencanaan dengan yang menjadi visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih termuat kendati RPJMD untuk periode saat ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 juga mengacu dan memperhatikan nota kesepakatan Bupati dan DPRD Nomor 007.3/1788/IV/2021 dan hasil konsultasi yang diajukan bupati kepada gubernur Nomor 050.13/200/V/Bappeda terkait rancangan awal RPJMD serta berita acara hasil kesepakatan musrenbang RPJMD pada tanggal 17 Juni 2021. Visi yang terjabarkan pada Rancangan Awal RPJMD tersebut adalah, “Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara” dengan arah kebijakan di tahun 2022, **“Pengembangan perekonomian dan sistem sosial tangguh Covid didukung penguatan infrastruktur dasar”**.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam RKP Tahun 2022, yang kemudian ditelaah hasil kinerja melalui Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 dan hasil evaluasi RKPD tahun 2020 dan koordinasi dengan Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya penyusunan dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 yang merupakan hasil dari tahapan awal yang dimulai dengan Musrenbang Kabupaten sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu RKPD Tahun 2022 ini Juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja ( Renja) untuk Tahun yang sama.

# PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022



## RINCIAN PROGRAM PRIORITAS

| No | Prioritas RKPD    | Sasaran RPJMD                                                                                    | Program Prioritas                                                                           |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemulihan Ekonomi | Sasara 2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia                                                | Program Pengembangan Ekspor                                                                 |
|    |                   | Sasaran 3: Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten                                | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan                            |
|    |                   |                                                                                                  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                 |
|    |                   |                                                                                                  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
|    |                   | Sasaran 4: Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Serap Tenaga Kerja Sektor-Sektor Pertanian Daerah | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                        |
|    |                   |                                                                                                  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                     |
|    |                   |                                                                                                  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                           |
|    |                   |                                                                                                  | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                                |
|    |                   |                                                                                                  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha                                                  |

|   |                                        |                                                                                                               |                                                                                                            |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        |                                                                                                               | Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)                                                                              |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Pengembangan Umkm                                                                                  |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Kooperasi                                                               |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                        |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                            |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |
|   |                                        | Sasaran 6: Berkembangnya Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri                                    | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                    |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                                          |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                                       |
|   |                                        | Sasaran 9: Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat                                         | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                              |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                   |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                                        |
| 2 | <b>Pembangunan Infrastruktur Dasar</b> | Sasaran 1: Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Dalam Mendukung Pemerataan Perkembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                              |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                                       |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)                                              |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                                                             |
|   |                                        |                                                                                                               | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik                                                        |
|   |                                        | Sasara 2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia                                                             | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Umum                                            |
|   |                                        | Sasaran 10: Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah                         | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                        |

|          |                                  |                                                                                                  |                                                                             |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pengelolaan Persampahan                                             |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional            |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Penanggulangan Bencana                                              |
| <b>3</b> | <b>Reformasi Struktural</b>      | Sasara 2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia                                                | Program Pengembangan Kurikulum                                              |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                   |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                        |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pembinaan Perpustakaan                                              |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                   |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen                              |
|          |                                  | Sasaran 3: Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten                                | Program Pengelolaan Pendidikan                                              |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pelayanan Penanaman Modal                                           |
|          |                                  | Sasaran 4: Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Serap Tenaga Kerja Sektor-Sektor Pertanian Daerah | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                  |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Promosi Penanaman Modal                                             |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                      |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Hubungan Industrial                                                 |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|          |                                  | Sasaran 8: Berkembangnya Inovasi Daerah                                                          | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                                  |
| <b>4</b> | <b>Penanggulangan Kemiskinan</b> | Sasara 2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia                                                | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)                                   |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)                |
|          |                                  |                                                                                                  | Program Pengendalian Penduduk                                               |

|   |                     |                                                                                   |                                                                     |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                                                                                   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                               |
|   |                     |                                                                                   | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)                                    |
|   |                     |                                                                                   | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
|   |                     | Sasaran 5 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat                            |                                                                     |
| 5 | Reformasi Birokrasi | Sasaran 3: Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten                 | Program Pendaftaran Penduduk                                        |
|   |                     |                                                                                   | Program Pencatatan Sipil                                            |
|   |                     |                                                                                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik           |
|   |                     | Sasaran 7: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah   |
|   |                     |                                                                                   | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |
|   |                     |                                                                                   | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                  |
|   |                     |                                                                                   | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi             |
|   |                     |                                                                                   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                            |
|   |                     |                                                                                   | Program Kepegawaian Daerah                                          |
|   |                     |                                                                                   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |
|   |                     |                                                                                   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa                    |
|   |                     |                                                                                   | Program Administrasi Pemerintahan Desa                              |
|   |                     |                                                                                   | Program Penataan Desa                                               |
|   |                     |                                                                                   | Program Peningkatan Kerjasama Desa                                  |
|   |                     |                                                                                   | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd                  |

## 7 STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN

1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak melalui penguatan basis data pemenuhan standar pelayanan minimal
3. Meningkatkan produktivitas perekonomian
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi
5. Meningkatkan solidaritas sosial dan kerukunan antar ummat beragama
6. Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
7. Mendorong peran pemerintah desa dalam perekonomian

## PROYEKSI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL TAHUN 2021-2022

| No | Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Daerah | Capaian 2020 | Proyeksi 2021 | Proyeksi 2022 |
|----|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                   | -0,40        | 1,69          | 3,87 - 5,6    |
| 2  | PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)             | 23,24        | 24,18         | 25,86         |
| 3  | Inflasi (%)                               | 1,78         | 2,5±1         | 2,5±1         |
| 4  | Tingkat Kemiskinan (%)                    | 6,79         | 6,76          | 6,5 - 6,30    |
| 5  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)          | 2,71         | 2,62          | 2,5           |
| 6  | Indeks Pembangunan Manusia                | 65,71        | 66,34         | 67,00         |

## PROYEKSI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021-2022

### Proyeksi Pendapatan Tahun 2022

| No    | Uraian                                               | Tahun              |                    |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |                                                      | Tahun 2021         | Tahun 2022         |
| 1     | Pendapatan Daerah                                    |                    |                    |
| 1.1   | Pendapatan Asli Daerah                               |                    |                    |
| 1.1.1 | Pajak Daerah                                         | 8.696.489.481,00   | 10.493.858.368,00  |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah                                     | 14.287.323.167,00  | 14.587.820.416,00  |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan    | 330.000.000,00     | 1.149.400.000,00   |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah            | 8.465.560.299,00   | 2.163.789.480,50   |
| 1.2   | Pendapatan Transfer                                  |                    |                    |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat                            |                    |                    |
| I     | Dana Perimbangan                                     | 506.010.786.000,00 | 507.804.698.790,00 |
|       | 1. Dana Transfer Umum                                | 351.742.903.000,00 | 353.536.815.790,00 |
|       | a. Dana Bagi Hasil                                   | 7.039.655.000,00   | 7.110.051.550,00   |
|       | b. Dana Alokasi Umum                                 | 344.703.248.000,00 | 346.426.764.240,00 |
|       | 2. Dana Transfer Khusus                              | 154.267.883.000,00 | 154.267.883.000,00 |
|       | a. DAK Fisik                                         | 107.418.016.000,00 | 107.226.766.000,00 |
|       | b. DAK non Fisik                                     | 46.849.867.000     | 47.041.117.000,00  |
| II    | Dana Insentif Daerah                                 | 0                  | 20.000.000.000,00  |
| III   | Dana Desa                                            | 57.102.648.000,00  | 57.102.648.000,00  |
| 1.2.2 | Transfer Antar Daerah                                | 12.966.633.273,00  | 19.925.869.357,00  |
| I     | Pendapatan Bagi Hasil                                | 12.966.633.273,00  | 19.925.869.357,00  |
| II    | Bantuan Keuangan                                     | 0                  |                    |
| 1.3   | Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH                 | 18.617.072.609,00  | 24.693.081.944,00  |
| I     | Hibah                                                | 0                  | 0                  |
| II    | Dana Darurat                                         | 0                  | 0                  |
| III   | Lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 18.617.072.609,00  | 24.693.081.944,00  |

### Proyeksi Belanja Tahun 2022

| No | Uraian         | Tahun      |            |
|----|----------------|------------|------------|
|    |                | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|    | Belanja Daerah |            |            |

|            |                              |                        |                           |
|------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Belanja Daerah</b>        | <b>626.000.847.049</b> | <b>642.506.769.618,41</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>       | <b>385.226.105.853</b> | <b>384.441.288.685,41</b> |
| I          | Belanja Pegawai              | 163.645.405.091        | 175.100.583.447,37        |
| II         | Belanja Bunga                | 3.500.000.000          | 3.916.449.866,00          |
| III        | Belanja Hibah                | 9.345.829.908          | 9.345.829.908,00          |
| IV         | Belanja Bantuan Sosial       | 1.702.130.000          | 1.000.000.000,00          |
| V          | Belanja barang dan jasa      | 207.032.740.854        | 195.078.425.464,04        |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Modal</b>         | <b>145.397.802.936</b> | <b>160.609.151.354,00</b> |
| <b>2.3</b> | <b>Belanja Tidak terduga</b> | <b>3.000.000.000</b>   | <b>5.000.000.000</b>      |
| <b>2.4</b> | <b>Belanja Transfer</b>      | <b>92.376.938.260</b>  | <b>92.456.329.579,00</b>  |
| I          | Belanja Bantuan Keuangan     | 92.376.938.260         | 92.456.329.579,00         |

### Proyeksi Pembiayaan Tahun 2022

| No         | Jenis Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah       | Tahun             |                   |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                          | 2021              | 2022              |
| <b>3.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                             |                   |                   |
| 3.1.1      | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) | 7.940.595.045,000 | 18.639.380.591,31 |
| 3.1.2      | Penerimaan pinjaman daerah                               | 54.591.886.400,00 | 0                 |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                            |                   |                   |
| 3.2.1      | Penyertaan Modal                                         | 0                 | 0                 |
| 3.2.2      | Pembayaran Pokok Utang                                   |                   | 22.072.093.448,00 |

# RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2022

| No | Urusan                                                                                    | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Sub Kegiatan | Jumlah Pagu     | Perangkat Daerah Penanggung jawab                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           | RKPD 2022      | RKPD 2022       | RKPD 2022           | RKPD 2022       |                                                                                                       |
| 1  | 2                                                                                         | 3              | 4               | 5                   | 6               | 7                                                                                                     |
| 1  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                     | 5              | 16              | 90                  | 143.973.166.948 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                       |
| 2  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                      | 5              | 23              | 106                 | 87.407.162.399  | DINAS KESEHATAN                                                                                       |
| 3  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                      | 2              | 11              | 52                  | 35.710.118.293  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                                                                               |
| 4  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 10             | 20              | 73                  | 106.954.744.250 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                               |
| 5  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 4              | 16              | 55                  | 5.120.293.146   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN                                        |
| 6  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 3              | 12              | 47                  | 5.707.355.784   | DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                  |
| 7  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2              | 12              | 30                  | 2.514.950.000   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                   |
| 8  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         | 7              | 13              | 26                  | 2.426.777.276   | DINAS SOSIAL                                                                                          |
| 9  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                   | 4              | 4               | 5                   | 213.026.918     | DINAS TRANSMIGRASI                                                                                    |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   | 6              | 12              | 17                  | 555.000.000     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                         | 3              | 11              | 33                  | 2.181.571.685   | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                                                |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                     | 2              | 2               | 4                   | 2.500.000.000   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN                                        |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                               | 7              | 14              | 33                  | 3.990.857.098   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 | 5              | 17              | 52                  | 4.385.600.000   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                               |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                               | 4              | 10              | 29                  | 3.431.809.198   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                |
| 1  | 2                                                                                         | 3              | 6               | 9                   | 12              | 21                                                                                                    |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                   | 4              | 15              | 64                  | 5.978.533.889   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                    | 2              | 10              | 29                  | 2.479.918.833   | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                     |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                     | 3              | 11              | 27                  | 2.105.921.408   | DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                          |
| 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                            | 6              | 6               | 11                  | 4.014.500.000   | DINAS PENANAMAN MODAL , PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
| 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                | 5              | 12              | 50                  | 5.175.627.000   | DINAS PENANAMAN MODAL , PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH               |

|    |                                                    |   |    |     |                 |                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|---|----|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2 | 3  | 4   | 550.000.000     | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                        |
| 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK               | 1 | 1  | 1   | 5.000.000       | DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
| 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN              | 1 | 2  | 2   | 42.080.000      | DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
| 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN              | 3 | 4  | 6   | 615.000.000     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                  |
| 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN            | 2 | 9  | 31  | 11.721.672.402  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                 |
| 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN               | 2 | 3  | 4   | 245.000.000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                 |
| 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  | 5 | 21 | 66  | 16.289.500.000  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                     |
| 28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA              | 4 | 12 | 30  | 1.931.379.374   | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                        |
| 29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN               | 7 | 20 | 66  | 16.600.000.360  | DINAS PERTANIAN                                                  |
| 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN             | 7 | 16 | 36  | 3.744.375.648   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                              |
| 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN           | 2 | 2  | 5   | 5.284.500.000   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                              |
| 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI            | 4 | 8  | 24  | 1.855.295.506   | DINAS TRANSMIGRASI                                               |
| 33 | SEKRETARIAT DAERAH                                 | 3 | 20 | 72  | 40.499.442.513  | SEKRETARIAT DAERAH                                               |
| 34 | SEKRETARIAT DPRD                                   | 2 | 18 | 81  | 20.620.214.785  | SEKRETARIAT DPRD                                                 |
| 1  | 2                                                  | 3 | 6  | 9   | 12              | 21                                                               |
| 35 | PERENCANAAN                                        | 3 | 14 | 54  | 4.209.630.210   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 36 | KEUANGAN                                           | 4 | 15 | 116 | 121.174.903.615 | BADAN KEUANGAN                                                   |
| 37 | KEPEGAWAIAN                                        | 2 | 11 | 44  | 2.547.583.306   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                      |
| 38 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                           | 1 | 1  | 1   | 75.922.012      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                      |
| 39 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                        | 1 | 4  | 14  | 770.000.000     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 40 | INSPEKTORAT DAERAH                                 | 3 | 11 | 37  | 4.231.155.339   | INSPEKTORAT                                                      |
| 41 | KECAMATAN                                          | 6 | 15 | 44  | 1.874.189.972   | KECAMATAN PANGALE                                                |
| 42 | KECAMATAN                                          | 6 | 13 | 32  | 1.800.774.468   | KECAMATAN TOPOYO                                                 |
| 43 | KECAMATAN                                          | 2 | 8  | 31  | 1.426.440.796   | KECAMATAN TOBADAK                                                |
| 44 | KECAMATAN                                          | 3 | 9  | 28  | 1.656.401.130   | KECAMATAN KAROSSA                                                |
| 45 | KECAMATAN                                          | 6 | 14 | 32  | 1.380.571.550   | KECAMATAN BUDONG-BUDONG                                          |
| 46 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                        | 3 | 9  | 22  | 1.460.939.412   | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                               |